

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI  
DAERAH DI KOTA PADANG SIDEMPUAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUDA HALOMOAN SIREGAR**

**NIM: 09.852.0002**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2014**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi :** STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN  
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH  
DI KOTA PADANG SIDEMPUAN

**Nama Mahasiswa :** MUDA HALOMOAN SIREGAR

**No. Stambuk :** 09 852 0002

**Program Studi :** ADM NEGARA

**Menyetujui :**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**



(Drs. H. M. Thamrin Nst, MSi)

**Pembimbing II**



(Anggreini Atmei, SH, M.Hum)



**Dekan**



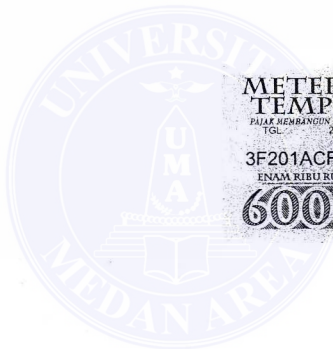
(Dr. Abdul Kadir, MSi)

**Tanggal Lulus:**  
\_\_\_\_\_

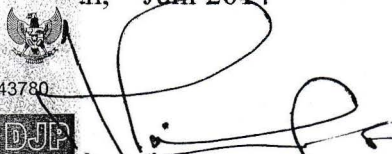
## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelas akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2014

  
Muda Halomoan Siregar  
09 852 0002

# **STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**Muda Halomoan Siregar (NPM 09.852.0002)-**

## **ABSTRAK**

Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber pendapatan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat strategi peningkatan pendapatan asli daerah, dan usaha apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan peningkatan pendapatan asli daerah tersebut.

Dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota padangsidimpun ada beberapa strategi yang dilakukan. Dimana strategi tersebut yaitu: Intensifikasi diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang bersungguh-sungguh, sekuat tenaga atau sehebat-hebatnya, yang harus dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya. Apabila suatu daerah mengalami peningkatan di bidang perekonomian dan pembangunan maka secara langsung pula akan dapat meningkatkan sumber pemasukannya dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang terjadi di Kota Padangsidimpun dimana sektor yang tidak mendukung terselenggaranya penerimaan sektor pajak adalah disebabkan ketidaktahuan masyarakat kemana dana pajak tersebut dipergunakan. Pemerintah Kota Padangsidimpun sebagai pengawas umum pemerintahan daerah yaitu Inspektorat Wilayah Daerah, maka inspektorat Wilayah Kota Padangsidimpun mengawasi tentang pelaksanaan pemungutan pajak.

Keywords :

Kata-kata kunci: strategi peningkatan, pendapatan asli daerah, otonomi daerah

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah : “STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Ahmad Guntur Siregar dan Ibunda tersayang Riayati Pane yang telah memberikan motivasi, perhatian dan dorongan baik berupa moril dan materil maupun doa yang tulus ikhlas setiap hari tanpa henti-hentinya.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta saran-saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama sekali kepada :

1. Prof. H. Yakub Matondang selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Dr. Abdul Kadir, S.H, M.Hum, selaku pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Bapak Drs. H. M. Thamrin Nst, M.si, sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Ibu Anggreni Atmei Lbs, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
6. Bapak Erwin Hotmansyah Harahap, S.Stp, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan.
7. Bapak Muchlis Daulay, Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan yang telah bersedia menjadi sipervisor penulis serta meluangkan waktunya dan memberikan data-data yang berhubungan dengan penyelesaian laporan tugas akhir ini.
8. Seluruh staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan.
9. Buat someone spesial Muhayrani Andini yang telah banyak memberikan perhatian, masukan dan dorongan semangat.
10. Untuk adikku Saniah Siregar, yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.
11. Untuk kawan lamaku Wa Ijal, Mas Raju, Zamzami, Kodir, dan Danil, yang selama ini menjadi tempat berbagi suka dan duka selama menjalani masa kuliah.
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2009 yang selama ini telah menjadi keluarga penulis.

13. Rekan – rekan Sealmamater.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhanya kepada kita semua, Amin.

Ya Rabbal Alamin..

Medan, Juni 2014



Muda Halomoan Siregar  
NPM: 09.852.0002



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Pembatasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Pemikiran .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian Strategi .....	8
2.2 Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah.....	10
2.3 Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah .....	14
2.4 Prinsip Otonomi Daerah .....	16
2.5 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	17
2.6 Fungsi Pendapatan Asli Daerah .....	22
2.7 Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Populasi dan Sampel .....	25





3.2 Metode Pengumpulan Data .....	25
3.3 Variabel dan Defenisi Operasional .....	26
3.4 Metode Analisis Data .....	27

## **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

4.1 Letak/Tempat Wilayah Administrasi .....	28
4.2 Tata Kerja Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan .....	28
4.3 Susunan Organisasi .....	29

## **BAB V ANALISIS DAN EVALUASI**

5.1 Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah .....	44
5.2 Hambatan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	50
5.3 Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut .....	51

## **BAB VI KESIMPULAN**

6.1 Kesimpulan.....	58
6.2 Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR GAMBAR

halaman

1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Kota Padang  
    Sidimpuan .....



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam mencapai tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, pemerintah sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Agar pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan baik diseluruh wilayah tanah air, maka wilayah tanah air dibagi atas daerah besar dan kecil sebagaimana yang dikatakan oleh J.C.T. Simorangkir bahwa :

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Berdasarkan kutipan diatas maka daerah mempunyai susunan pemerintahan yang disebut dengan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk organisasi adalah sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkungan wilayah dan juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Memandang tugas-tugas yang diemban oleh pemerintah daerah amatlah kompleks terutama sekali dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan Undang –Undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 79 dikatakan bahwa : sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah, yaitu:
  1. Hasil pajak daerah,
  2. Hasil retribusi daerah,
  3. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan kutipan diatas maka pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana apabila keadaan keuangan daerah cukup memadai. Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber pendapatan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut juga berarti daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dan keuangan yang cukup untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari berbagai unsur

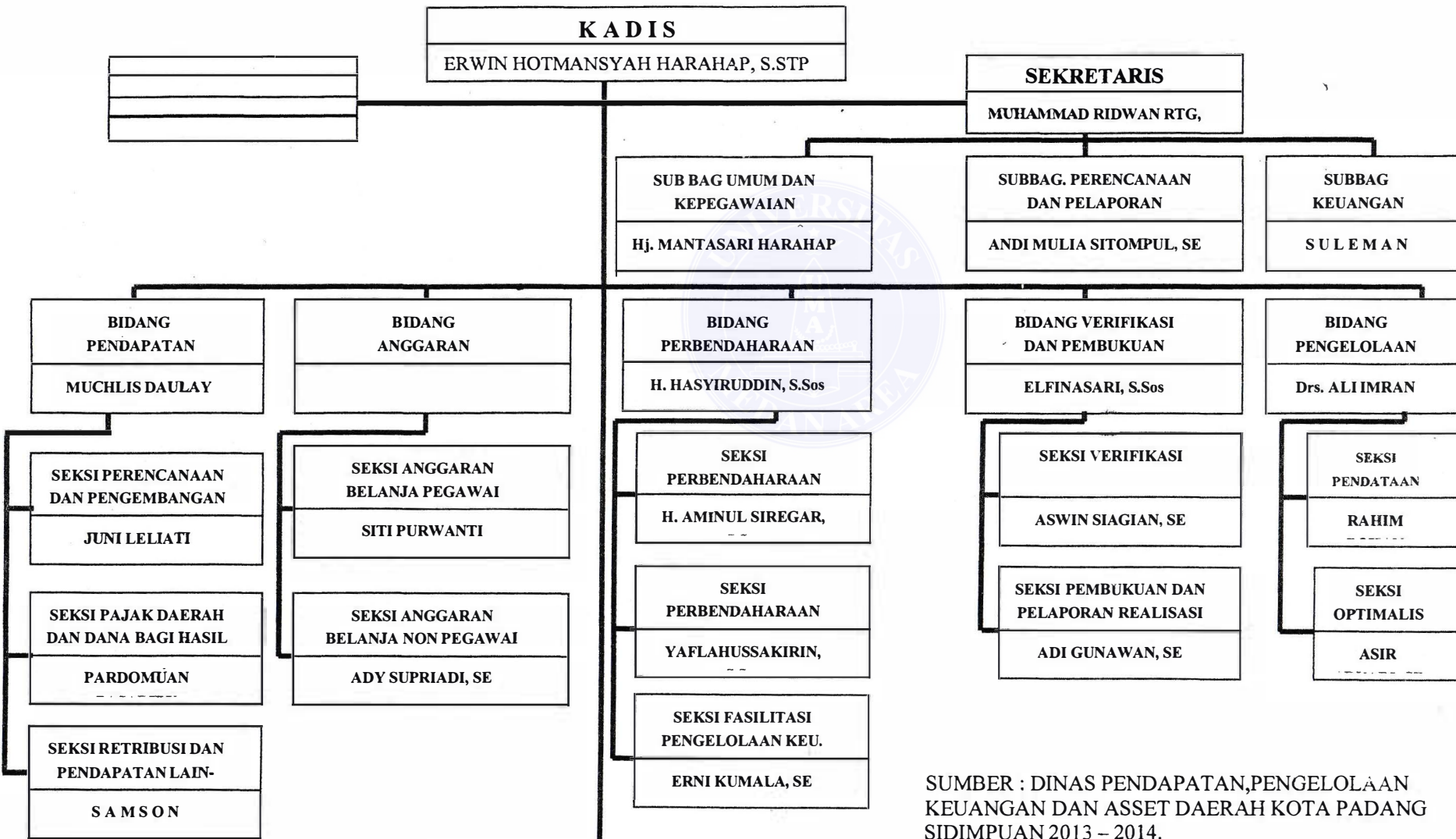
## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- B.H. Erickson dan T.A. Nosamchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1981.
- Bintoro Tjokroamijoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3S, Jakarta 2000.
- C.S.T. Kansil. Pengantar *Ilmu Hukum dan Tata Negara Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1999.
- Dian.2013.*Pengertian, Fungsi dan Asas Pemerintah Daerah*. Di akses pada <http://Dianchoco.blogspot.com/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html?m=1> Pada tanggal 08 April 2014 jam 10.24 WIB.
- Gintan, Lupita.2013.*Analisis Penerimaan Pajak Reklame*. Di akses pada [abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/07/intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak.html?m=1](http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/07/intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak.html?m=1) Pada tanggal 07 April 2013 jam 15.00 WIB.
- Ibnu Syamsi, *Dasar – dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- J.C.T.Simorangkir dan Mangreng Say, *tentang dan Sekitar Undang – Undang Dasar 1945*, Djambatan, Jakarta 1995.
- Joefri Abdullah, *Pokok – pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*, Cipta Rukun Sarana, Jakarta, 2004.
- M. Solly Lubis, *Pergesaran Garis Politik dan Perundang – Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 2008.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001.
- Mohammad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 2000.
- Mohammad Jimmi Ibrahiin.1991. *Prospek Otonomi Daerah.Semarang* : Dahara Prize.
- R.A. Suhardi, *Politik Sosial Modren, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Darma II P, Jakarta, 2003.

- Soewarno, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997.
- Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung 1986.
- Syaiful. 2009. *Analisi Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Di akses pada [papanyafadiyah.blogspot.com/2009/12/analisis-strategi-peningkatan-pad-kota.html?m=1](http://papanyafadiyah.blogspot.com/2009/12/analisis-strategi-peningkatan-pad-kota.html?m=1) Pada tanggal 08 April 2014 jam 16.01 WIB.
- UU RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2000.



**GAMBAR 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN DAN ASSET DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**TA. 2013**



SUMBER : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN 2013 - 2014.





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON : 061 - 7366878, 7364348, FAX. 7366998, MEDAN - 20233

Nomor *902* /F.5/I.2.b/20013

26 Agustus 2013

Lamp : -

Hal : Pengambilan Data

Kepada : Yth, Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kota Padang Sidempuan  
di-  
Padang Sidempuan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan saudara untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Muda Halomoan Siregar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 09.852.0002  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

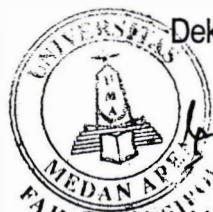
Untuk melaksanakan Pengambilan Data di Instansi yang Bapak Pimpin yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan

Guna penyusunan skripsi mahasiswa yang berjudul : " STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH"

Perlu kami tambahkan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada lembaga yang saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan, *yk*

Dr. Abdul Kadir, SH, MSi



# PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Padangsidimpun 09 September 2013

or : 070/ 279 /KKL/2013  
: Biasa  
biran : 1 (satu) Berkas  
al : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Sdr, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan  
Terpadu Daerah Kota Padangsidimpun  
di -  
Padangsidimpun

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Memperhatikan Surat dari Universitas Medan Area Nomor: 982/F.5/1.2.b/2013 Tanggal 26 Agustus 2013
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpun memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Muda Halomoan Siregar  
NIM : 098520002  
Alamat : Palopat Maria Padangsidimpun  
Penanggung Jawab : Dr. Abdul Kadir, Sh, M.Si  
Judul Penelitian : **“STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH”.**  
Tempat Penelitian : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padangsidimpun  
Lamanya Penelitian : 2 (Dua) Minggu  
Anggota Penelitian : 1 Orang

3. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku, menjaga tata tertib, Keamanan dan menghindari pernyataan/ tulisan yang dapat menyinggung perasaan, menghina Agama, Bangsa, Negara dan tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Setelah selesai Kegiatan Penelitian dimaksud, Peneliti berkewajiban memberikan 1 (satu) set hasil Penelitian kepada Walikota Padangsidimpun Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpun.
5. Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan sehubungan dengan Pengurusan Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Padangsidimpun.
6. Demikian di sampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati sebagaimana tersebut diatas Rekomendasi ini akan dicabut/ dibatalkan.

**An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASIPANG NILAI-NILAI KEBANGSAAN**



usan :  
pak Walikota Padangsidimpun (sebagai laporan)  
L. Abdul Kadir, Sh, M.Si  
ng Bersangkutan  
tinggal